



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 500 / 140 /TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022-2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y, z), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y, z), \quad \frac{dz}{dt} = h(x, y, z),$$

where f, g, h are continuous functions of x, y, z and satisfy certain conditions. It is shown that under these conditions there exists a unique solution of the system of equations passing through any given point.

2. In the second part of the paper the author considers the problem of the stability of the solutions of the system of equations. It is shown that if the functions f, g, h satisfy certain conditions, then the solutions of the system of equations are stable.

3. The third part of the paper is devoted to a study of the properties of the solutions of the system of equations. It is shown that the solutions of the system of equations are periodic if the functions f, g, h satisfy certain conditions.



4. The fourth part of the paper is devoted to a study of the properties of the solutions of the system of equations. It is shown that the solutions of the system of equations are bounded if the functions f, g, h satisfy certain conditions.

Memperhatikan: Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/1007/Tahun 2020 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 FEB 2022

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sebid	
2	Kelab	
3	Kabag Hukum	
4	Kabag Ete.	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 500 / 140 /TAHUN 2022
TENTANG
PETA JALAN IMPLEMENTASI
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022-2025

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022-2025

1. Latar Belakang

1.1 Pendahuluan

A. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemda

Rakorpusda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2019, dengan tema “Inovasi Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Digital”, menghasilkan kesepakatan salah satunya mengenai pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan TP2DD bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Pembentukan TP2DD secara umum diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Indonesia pada tanggal 13 Februari 2020.

Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat tersebut, pada tanggal 21 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/1007 Tahun 2020 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Banyumas. Keputusan Bupati tersebut diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun

2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan (Satgas P2DD). Tujuan dari pembentukan TP2DD untuk mempercepat proses elektronifikasi di daerah.

Elektronifikasi di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan terus berkembang hingga saat ini. Secara umum beberapa pendapatan daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menerapkan pembayaran non tunai seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel dan Restoran, Uji KIR hingga retribusi pasar. Selain itu elektronifikasi juga diterapkan pada lokasi-lokasi wisata milik Pemerintah Daerah yang telah terkoneksi dengan aplikasi Mas Basid. Sedangkan untuk metode pembayaran non tunai dapat dilakukan melalui layanan Perbankan yang ditunjuk seperti ATM, *mobile/internet banking*, EDC dan agen Laku Pandai. Selain itu beberapa jenis Pajak dan retribusi dapat dilakukan pembayaran melalui *Fintech* ataupun *e-commerce*.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk memperluas elektronifikasi transaksi melalui optimalisasi fungsi TP2DD, penambahan kanal digital pembayaran penerimaan Pajak dan Retribusi salah satunya menggunakan QRIS, perluasan implementasi elektronifikasi pada program kerja seluruh OPD di Kabupaten Banyumas dan bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan edukasi dan sosialisasi terkait literasi non tunai, literasi digital dan elektronifikasi kepada masyarakat Banyumas termasuk Pegawai SKPD.

B. Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah

B.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Banyumas merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 108 meter diatas permukaan laut, terletak antara $7^{\circ} 15' 05'' - 7^{\circ} 37' 10''$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 39' 17'' - 109^{\circ} 27' 15''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha. Secara administratif Kabupaten Banyumas berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan: Kabupaten Cilacap
- Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara

Keadaan wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu dan dataran tinggi. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, daratan di Kabupaten Banyumas terdiri dari 54,86% berada di ketinggian 0-100 m dan 45,14% berada di ketinggian 101 m – 500 m.

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan, 30 Kelurahan dan 301 desa, adapun daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Ajibarang	66,50	15
2	Banyumas	38,09	12
3	Baturaden	45,53	12
4	Cilongok	105,34	20
5	Gumelar	93,95	10
6	Kalibagor	35,73	12
7	Karanglewas	32,50	13
8	Kebasen	54,00	12
9	Kedung Banteng	60,22	14
10	Kembaran	25,92	16
11	Kemrajen	60,71	15
12	Jatilawang	48,16	11
13	Lumbir	102,66	10
14	Patikraja	43,23	13
15	Pekuncen	92,70	16
16	Purwojati	37,86	10
17	Purwokerto Barat	7,40	7
18	Purwokerto Selatan	13,75	7
19	Purwokerto Timur	8,42	6
20	Purwokerto Utara	9,01	7
21	Rawalo	49,64	9
22	Sokaraja	29,92	18
23	Somagede	40,11	9
24	Sumbang	53,42	19
25	Sumpiuh	60,01	14
26	Tambak	52,03	12
27	Wangon	60,78	12

B.2. Kondisi Demografis Wilayah

Hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat, penduduk di Kabupaten Banyumas berjumlah 1.776.918 jiwa, dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 894.695 jiwa dan perempuan 882.223 jiwa. Adapun distribusi penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan Kecamatan adalah sebagai berikut:

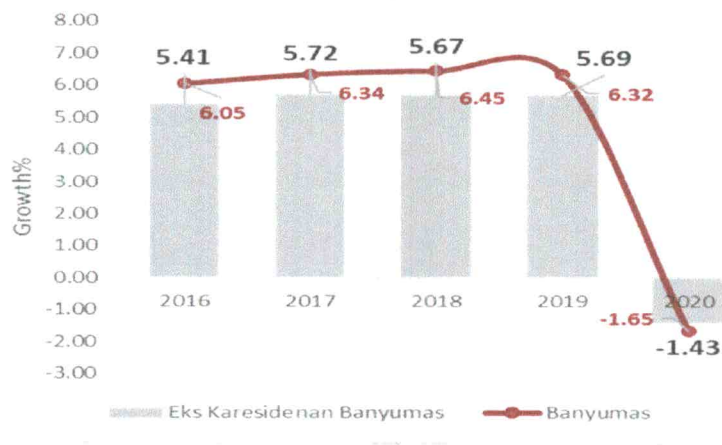
No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lumbir	25.151	24.719	49.870
2	Wangon	42.291	41.404	83.695
3	Jatilawang	33.465	32.966	66.431
4	Rawalo	26.690	26.157	52.847
5	Kebasen	34.006	33.134	67.140
6	Kemranjen	36.711	35.672	72.383
7	Sumpiuh	29.157	28.560	57.717
8	Tambak	25.136	25.022	50.158
9	Somagede	18.728	18.812	37.540
10	Kalibagor	28.642	28.158	56.800
11	Banyumas	26.458	26.420	52.878
12	Patikraja	30.347	30.290	60.637
13	Purwojati	18.621	18.360	36.981
14	Ajibarang	51.904	50.422	102.326
15	Gumelar	27.015	26.334	53.349
16	Pekuncen	38.292	37.284	75.576
17	Cilongok	63.196	61.488	124.684
18	Karanglewas	34.118	33.151	67.269
19	Kedungbanteng	31.162	30.609	61.771
20	Baturraden	26.871	26.643	53.514
21	Sumbang	47.182	45.978	93.160
22	Kembaran	41.383	40.354	81.737
23	Sokaraja	44.672	44.512	89.184
24	Purwokerto Selatan	36.046	36.258	72.304
25	Purwokerto Barat	26.153	26.649	52.802
26	Purwokerto Timur	26.909	27.676	54.585
27	Purwokerto Utara	24.389	25.191	49.580

1.2 Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah

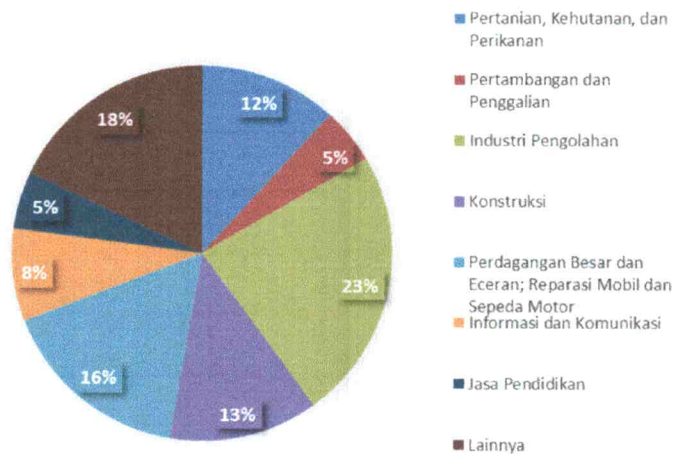
A. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami tren pertumbuhan yang positif yaitu berada pada kisaran 6% (yoy), namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tercatat mengalami kontraksi

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar -1,65% (yoy). Kontraksi tersebut disebabkan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020, kontraksi ini searah dengan daerah lain yang juga mengalami kontraksi pertumbuhan.



Struktur ekonomi Kabupaten Banyumas didominasi oleh Industri Pengolahan dengan pangsa pasar sebesar 23%, Pertambangan dan Penggalian sebesar 18%, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 16% dan disusul dengan sektor Konstruksi sebesar 13% dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12%.



B. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah

Salah satu komponen pendapatan daerah yang memiliki kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai kemandirian daerah dan mempunyai peranan penting dalam pembiayaan belanja daerah. Melihat pentingnya peranan PAD, mendorong setiap Pemerintah Daerah untuk dapat

memaksimalkan pendapatan daerah salah satunya melalui implementasi ETPD.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, PAD Kabupaten Banyumas pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 disebabkan melandanya Pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun detail PAD Kabupaten Banyumas dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2016	Rp541.418.386.910
2017	Rp619.701.627.380
2018	Rp648.326.914.030
2019	Rp686.805.512.330
2020	Rp567.415.794.110

Komposisi PAD sendiri terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan komposisi tersebut, kontribusi terbesar PAD Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 berasal dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan disusul oleh Pajak daerah. Adapun kontribusi masing-masing komponen secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Jenis PAD	Jumlah (Rp)	%
1	Pajak daerah	208.009.398.660,00	36,66
2	Retribusi daerah	23.783.036.660,00	4,19
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.798.814.230,00	2,78
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	319.824.544.560,00	56,37
JUMLAH		567.415.794.110,00	100,00

C. Kebijakan Pemda Dalam Mendorong Perekonomian dan Fiskal Daerah

Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Banyumas. Perekonomian Kabupaten Banyumas mengalami kontraksi sebesar -1.65% (yoy), pertama kali

dalam 5 tahun terakhir yang selalu mencatatkan tren pertumbuhan positif. Perekonomian Banyumas mulai membaik di triwulan I 2021 meskipun beberapa sektor usaha masih mencatatkan pertumbuhan negatif, diprediksi perekonomian Banyumas dapat semakin membaik pada triwulan II 2021 hingga triwulan IV 2021.

Melalui dana pinjaman PEN sebesar Rp197.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar rupiah) yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Kabupaten Banyumas memfokuskan penggunaan anggaran tersebut pada pemulihan sektor UMKM dan pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya memulihkan perekonomian Kabupaten Banyumas. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun kawasan wisata baru seperti Bukit Bintang dan Indraprana; merevitalisasi kawasan wisata unggulan Kabupaten Banyumas antara lain Baturraden dan Taman Mas Kemambang; membangun sentra-sentra UMKM; dan memberikan pelatihan kepada UMKM berupa digitalisasi pemasaran dan pembayaran. Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap melalui sektor UMKM dan pariwisata selain mampu memulihkan perekonomian juga mampu meningkatkan PAD Kabupaten Banyumas.

Selain penggunaan dana PEN, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga meluncurkan program “*View Banyumas*” sebagai wahana citra promosi investasi dan layanan perizinan terintegrasi di Kabupaten Banyumas. *View Banyumas* bertujuan mengintegrasikan dan menyediakan data informasi publik sebagai upaya promosi investasi serta memberikan layanan perizinan dan kemudahan berinvestasi. Melalui program tersebut diharapkan mampu meningkatkan investor, terutama pada industri-industri padat karya yang selama ini menjadi tumpuan perekonomian Kabupaten Banyumas.

Sedangkan dalam penanganan Pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengencarkan vaksinasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur kewajiban penggunaan masker, pembatasan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dan melakukan sosialisasi secara berkala mengenai penanganan Pandemi COVID-19 melalui mobil keliling milik Dinas Sosial. Terkendalnya kasus

COVID-19 di Kabupaten Banyumas mampu menggeliatkan kembali roda perekonomian di Kabupaten Banyumas.

2. Asesmen Ekonomi dan Sistem Pembayaran di Daerah

2.1 Jaringan Komunikasi (Internet)

A. Cakupan Jaringan dan Internet

Salah satu faktor pendukung suksesnya implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) adalah tersedianya cakupan jaringan internet yang baik dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Saat ini seluruh wilayah Kabupaten Banyumas sudah terdapat jaringan 1G & 2G (telepon dan SMS), sedangkan untuk jaringan 3G & 4G (internet) belum merata diseluruh wilayah, terutama wilayah-wilayah yang berada di pegunungan dan terletak jauh dari area pemukiman penduduk.

B. Kecepatan

Saat ini kecepatan internet seluler di Kabupaten Banyumas bervariasi antara 6Mbps hingga 20Mbps, sedangkan untuk internet fiber optik bervariasi antara 10Mbps hingga 100Mbps

C. Provider

Saat ini hampir seluruh provider seluler yang ada di Indonesia beroperasi di Kabupaten Banyumas, seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Tri (3) dan lainnya. Sedangkan untuk provider internet terdapat Indihome, Biznet, Iconnet dan beberapa ISP lokal lainnya.

2.2 Infrastruktur Perbankan

A. Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Banyumas yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sekarang dengan Bank Jateng. Bank Jateng merupakan bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah. Kantor Pusat Bank Jateng berada di Kota Semarang dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 1.765 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

B. Buku Bank Pengelola RKUD

Bank Jateng merupakan bank umum yang terdaftar sebagai kategori Bank umum BUKU III sejak tahun 2018, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.S-6/KR.03/2018 tanggal 9 Februari 2018. Bank BUKU III adalah Bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah) dengan cakupan kegiatan meliputi kegiatan pembiayaan perdagangan, sistem pembayaran, transaksi valuta asing, treasuri dan penyertaan 25% pada lembaga keuangan di dalam dan luar negeri (terbatas hanya kawasan Asia).

C. Keberadaan CMS dan Layanan Non Tunai yang Dimiliki Bank Pengelola RKUD

Bank Jateng saat ini memiliki berbagai layanan non tunai yang sudah digunakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, beberapa layanan non tunai tersebut antara lain:

- *BIMA Mobile* : Layanan mobile banking bagi nasabah individu
- *ATM* : layanan perbankan mandiri dengan anjungan tunai yang saat ini tersebar di 886 titik di Jawa Tengah
- *SP2D Online* : Integrasi sistem keuangan Pemda dengan sistem bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara online antar sistem.
- *Cash Management system (CMS)* : Layanan internet banking yang diperuntukan bagi perusahaan atau institusi. CMS juga dapat digunakan oleh SKPD untuk kegiatan belanja SKPD secara *real time*.
- *Electronic Data Capture (EDC)* : Perangkat untuk membaca data elektronik (kartu debit, ATM, kredit) dan dapat meneruskan data transaksi ke sistem bank.
- *Laku Pandai* : Layanan perbankan yang dilakukan tanpa melalui jaringan kantor, namun bekerja sama dengan pihak ketiga.
- *BIMA QRIS* : layanan QRIS milik Bank Jateng untuk melakukan transaksi non tunai menggunakan *QR Code*.

- *Omni Channel* : layanan multi saluran pada mobile/internet banking Bank Jateng untuk melakukan transaksi non tunai seperti pembayaran PDAM, Rumah Sakit, PBB, Retribusi Pasar, Pajak dan KIR kendaraan bermotor.

D. Jumlah Infrastruktur Bank Pengelola RKUD di Wilayah Kerja Pemda (ATM, EDC)

Saat ini Bank Jateng memiliki jaringan layanan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Kantor Cabang
- 5 Kantor Cabang Pembantu
- 7 Kantor Kas
- 15 Payment Point
- 41 ATM
- 6 Layanan Syariah
- 1 Mobil Kas Keliling (sudah dilengkapi ATM)
- 1 Mesin setoran tunai
- 23 mesin EDC
- 22 Agen Laku Pandai

E. Kerja sama yang Dimiliki Bank RKUD dalam Layanan Non Tunai

Bank Jateng memiliki beberapa MoU kerjasama untuk meningkatkan layanan non tunai di Kabupaten Banyumas, kerjasama ini dijalin baik itu dengan Pemerintah Daerah, institusi lain, *Marketplace*, *Fintech* maupun BPR. Adapun detail kerja sama yang sedang berjalan saat ini adalah:

- Pembayaran PBB melalui Tokopedia
- Pembayaran PBB melalui GoJek
- Pembayaran PBB melalui Kantor Pos
- Pembayaran PBB dan Retribusi melalui BPR BKK
- Pembayaran layanan pasien RSUD Banyumas
- Pembayaran layanan pasien RSUD Ajibarang

- Integrasi CMS Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan *marketplace* SIPlah
- Kerjasama dengan Globalindo untuk penyediaan *tapping box* pajak daerah

F. Lainnya

Sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan optimal bagi nasabahnya, Bank Jateng meluncurkan layanan *contact center* (14066) yang beroperasi 24 jam selama 7 hari. Selain itu, Bank Jateng juga mengoptimalkan website <https://www.bankjateng.co.id/> dengan meningkatkan *bandwidth* agar para pengakses mudah mengunjungi dan berinteraksi melalui website tersebut.

2.3 Lingkungan Strategis

A. Arah kebijakan Pemda dalam mendukung digitalisasi daerah dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Pemerintah Kabupaten Banyumas secara aktif mengimplementasikan digitalisasi di berbagai sektor sebagai upaya meningkatkan perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah, memberikan kemudahan berinvestasi dan sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi daerah serta nasional. Beberapa kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendukung digitalisasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain:

- Implementasi Banyumas *Smart City*, pembangunan dan implementasi Banyumas *Smart City* bertujuan untuk mewujudkan visi Kabupaten Banyumas yaitu “Menjadikan Banyumas yang Adil-Makmur dan Mandiri dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi Serta Kolaborasi Lintas Sektoral”
- Bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Perbankan untuk mendigitalisasi pelaku UMKM melalui program *on boarding* UMKM yang meliputi pemasaran digital dan pembayaran digital, sebagai upaya meningkatkan omset penjualan pelaku UMKM.

- Mendorong pembentukan desa-desa digital melalui Koperasi Digital yang terintegrasi dengan Banyumas *Smart City*.
- Meluncurkan aplikasi layanan publik SIAPPMAS (Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas). Aplikasi ini bertujuan mempermudah proses Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional.
- Digitalisasi transaksi pembayaran pada pedagang pasar di Pasar Manis, Pasar Cikebrok dan Pasar Wage menggunakan QRIS.

B. Keberadaan regulasi pendukung ETP dan *E-Government*.

Implementasi ETP diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel dan pada akhirnya mampu meningkatkan PAD. Implementasi ETP di Kabupaten Banyumas ditindaklanjuti melalui beberapa regulasi antara lain:

- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Pengeluaran Daerah.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Secara Elektronik.
- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/1007 Tahun 2020 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Banyumas.

C. Tingkat literasi non tunai dan digital masyarakat

- a. Tingkat literasi non tunai masyarakat Kabupaten Banyumas sudah cukup baik, terutama masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Terlihat dari penggunaan alat pembayaran non tunai

seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik dan QRIS oleh masyarakat di tempat-tempat perbelanjaan, restoran, café, hotel serta pembayaran Pajak dan retribusi daerah. Sedangkan literasi non tunai di daerah pedesaan perlu ditingkatkan lagi, masyarakat masih belum terbiasa menggunakan alat pembayaran non tunai. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai secara tidak langsung menjadi sarana edukasi bagi masyarakat pedesaan.

- b. Tingkat literasi digital masyarakat Kabupaten Banyumas secara umum masih perlu ditingkatkan. Sebenarnya lebih dari 95% masyarakat di Kabupaten Banyumas sudah mengakses internet dan menggunakan internet pada kegiatan sehari-hari, namun penggunaan internet ini hanya sebatas mengakses informasi dan bermedia sosial bukan sebagai penggunaan produktif. Masih diperlukan upaya-upaya memanfaatkan teknologi digital terutama di sektor produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Kendala dan Permasalahan Pemda Dalam Mendorong Digitalisasi Daerah

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam implementasi digitalisasi antara lain:

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi terkait teknologi, elektronifikasi dan digitalisasi.
- Belum meratanya infrastruktur pendukung digitalisasi terutama di daerah pegunungan.
- Masih terjadi *gap* informasi mengenai program-program pengembangan digitalisasi di daerah.
- Tingkat literasi masyarakat terhadap transaksi non tunai dan digitalisasi masih belum merata.

3. Rencana Kerja Perluasan ETP 2022-2025

3.1 Target dan Sasaran Roadmap

Adapun target dan sasaran dalam penyusunan roadmap ini adalah:

- Meningkatkan perluasan dan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda.
- Meningkatkan kualitas pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).
- Meningkatkan transaksi non tunai masyarakat terutama pada transaksi pembayaran penerimaan daerah (Pajak, Retribusi, dll)
- Meningkatkan literasi non tunai dan digital masyarakat Kabupaten Banyumas.

3.2 Program Kerja 2022

No	Program Kerja	Tahun Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Implementasi <i>e-ticketing</i> dan integrasi pemesanan secara online melalui aplikasi MAS BASID pada Museum Wayang Banyumas	2022	Dinporabudpar
2	Implementasi <i>e-ticketing</i> dan integrasi pemesanan secara online melalui aplikasi MAS BASID pada Pemandian Kalibacin Rawalo	2022	Dinporabudpar
3	Implementasi <i>e-ticketing</i> pada Kolam Renang Tirta Kembar	2022	Dinporabudpar
6	Elektronifikasi pada pembayaran pelayanan KIR kendaraan bermotor	2022	Dinhub
7	Implementasi pembayaran non tunai pada Puskesmas Sumpiuh I	2022	Dinkes
8	Implementasi pembayaran non tunai pada Puskesmas Purwokerto Selatan	2022	Dinkes
9	Implementasi pembayaran non tunai pada Puskesmas Jatilawang	2022	Dinkes
10	Implementasi <i>e-retribusi</i> pada layanan sedot tinja/kakus	2022	Dinperkim
11	<i>High Level Meeting</i> TP2DD Kabupaten Banyumas	2022	TP2DD

3.3 Program Kerja 2023-2025

No	Program Kerja	Tahun Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Penggunaan <i>internet/mobile banking</i> oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Banyumas	2025	Bapenda
2	Implementasi QRIS sebagai salah satu metode pembayaran non tunai pada Koperasi-koperasi milik OPD	2023	Bapenda & Bank Jateng
3	<i>High Level Meeting</i> TP2DD Kabupaten Banyumas	2023, 2024, 2025	TP2DD
4	Pelatihan peningkatan kompetensi terkait elektronifikasi dan digitalisasi bagi pegawai di lingkungan Diskominfo Kabupaten Banyumas	2023	Dinkominfo
5	Perluasan penggunaan <i>Cash Management System</i> (CMS) pada program kerja OPD	2024	Bank Jateng
6	Sosialisasi dan peningkatan literasi pembayaran non tunai dan literasi digital pada seluruh PNS di lingkungan Pemda Banyumas	2023	BI & OJK
7	Sosialisasi terkait penggunaan CMS kepada seluruh OPD	2024	BI & Bank Jateng
8	Elektronifikasi pembayaran parkir pada sarana olahraga milik Pemda Kabupaten Banyumas	2024	Dinporabudpar
9	Penguatan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan alat-alat pendukung pembayaran non tunai (EDC, ATM, <i>Tapping box</i> , dll)	2025	Bank Jateng
10	Implementasi pembayaran menggunakan QRIS pada pembayaran retribusi PBB	2023	Bapenda
11	Implementasi pembayaran menggunakan QRIS pada layanan kesehatan di seluruh Puskesmas	2025	Dinkes

[illegible]

[illegible]

No	Rencana Program Kerja	Timeline 2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penggunaan <i>internet/mobile banking</i> oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Banyumas												
2	<i>High Level Meeting</i> TP2DD Kabupaten Banyumas												
3	Implementasi pembayaran menggunakan QRIS pada layanan kesehatan di seluruh Puskesmas												
4	Penguatan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan alat-alat pendukung pembayaran non tunai (EDC, ATM, <i>Tapping box</i> , dll)												

BUPATI BANYUMAS,

No	JABATAN	PARAF
1.	<i>Seleda</i>	
2.	<i>Melbay</i>	
3.	<i>Keleng Husein</i>	
4.	<i>Keleng Eka</i>	



ACHMAD HUSEIN